KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 1 1 0 5			H.4 X	H.4 X Final	
		H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan			н.5	Tidak Final	
A. IDENTITAS PENERIMA PENGI	AA II AA	YANG DIPOTONG					
	8 9 3		2 2 0 0 0				
A.1 NPWP : [7 9]	0 9 3	3 2 4 1 4 7					
A.2 NIK :							
A.3 Nama : ALFIAN S	ALAM, A	MD.KEP.					
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTO	NG						
MASA PAJAK (mm-yyyy)	AJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1 B.2		B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
3 21-402-01		618.900	618.900	0	5	30.945	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen							
Nomor : B.10 PPh Pasal 21 ditanggun	ng oleh Pe	emerintah (DTP) berdasarkan : ng diberikan fasilitas PPh berda	Keterangan Bebas (SKB). Pembe Tanggal sarkan :	dd	mm [уууу	
C.1 NPWP Instansi Pemerintah		9 5 3 3 5 0	16 2 722	0 0 0			
C.2 Nama Instansi Pemerintah	:		THE LET LETELE RAH ATMA HUSADA MAHAK		ALIMANTAN	TIMUR	
C.3 ID Subunit Organisasi	:						
C.4 Tanggal		1 6 dd 0 3 mm	2 0 2 2 yyyy			_	
C.5 Nama Penandatangan	:	HARI JUMADI	<u> - - - </u>				
C.6 Pernyataan Wajib Pajak	:	Dengan ini saya menyatakan ba tandatangani secara elektronik.	ahwa bukti Pemotongan/Pemungu	tan Unifikasi telah s	aya isi dengan	benar dan telah saya	
		Sesuai dengan ketentuan yang elektronik sehingga tidak diperlu	berlaku, Direktorat Jenderal Pajak ukan tanda tangan.	κ mengatur bahwa α	dokumen ini tela	ah ditandatangani secara	
NXP1QP96							